



Buletin Parlementaria

Nomor 971/II/VIII/2017 • Agustus 2017



**Arogansi KPK
Harus Dihentikan**

**Aceh Miliki Potensi
pariwisata Luar Biasa**

**Banyak Sekolah di
Sumba Timur
Kekurangan
Ruang Kelas**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra foto bersama dengan Murid Sekolah Sumba Timur

Banyak Sekolah di Sumba Timur Kekurangan Ruang Kelas

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan banyak sekolah di Sumba Timur yang kekurangan ruang kelas.

“Kami melihat langsung banyak SD, SMP dan SMA di Sumba Timur ini yang masih kekurangan ruang kelas.

Contohnya saja SD Padammu dan SMP Uluwelu di Sumba timur ini, kepala sekolah di kedua sekolah itu mengakui bahwa saat PPDB (Penerimaan peserta didik baru) banyak menerima siswa, namun kekurangan ruang kelas untuk menampung para siswa. Akhirnya mereka mengambil langkah sekolah bergantian yakni pada pagi dan siang hari,” ungkap Ketua Tim yang juga Wakil ketua Komisi X Sutan Adil Hendra di Sumba Timur, Selasa (01/8/2017).

Selain itu, Komisi X juga menerima pengaduan terkait belum adanya beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan belum terjangkau KIP (kartu Indonesia pintar) di sekolah-sekolah di Sumba Timur.

Tidak hanya itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi X ini juga mendapat masukan terkait kesejahteraan guru. Masih banyak guru honorer yang belum mendapat tunjangan sertifikasi guru dan SK Inpasing. Selama

ini para guru honorer tersebut hanya mendapat honor sebesar 500 ribu rupiah per bulannya.

Menjawab hal tersebut, Sutan menjelaskan bahwa tunjangan sertifikasi dan SK Inpasing diberikan jika ada usulan dari daerah atau sekolah. Sementara sebagaimana yang diakui oleh para guru setempat, sekolah mereka belum pernah mengusulkan hal tersebut.

Disanalah politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai kurangnya komunikasi dan kordinasi antara sekolah dan diknas setempat. Oleh karena itu pihaknya berharap agar sekolah dan jajaran pemda terkait dapat lebih meningkatkan kordinasi, demi kesejahteraan para guru atau pendidik.

“Mutu pendidikan yang tinggi akan terealisasi kalau anak didik memiliki karakter yang kuat, pengajar atau guru memiliki kompetensi dan terjamin kesejahteraannya, serta adanya sarana prasarana yang mendukung. Masalah kesejahteraan guru

akan teratasi jika ada usulan tentang daftar-daftar penerima tunjangan sertifikasi dan SK inpasing dari sekolah dan Pemda,” ujar SAH, begitu Sutan adil hendra biasa disapa.

Sementara terkait kekurangan kelas, anggota Komisi X Anang Hermansyah yang turut hadir di Sumba Timur itu mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong agar pemerintah pusat menyalurkan anggaran-anggaran pendidikan untuk membangun ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Sebenarnya kekurangan kelas tidak hanya terjadi di Sumba Timur saja, banyak daerah-daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama. Oleh karena itu kami mendorong agar anggaran-anggaran yang sudah diperuntukkan bagi pendidikan khususnya program pendirian ruang kelas baru dapat segera disalurkan ke daerah-daerah dan sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas. Dan kami tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan dan terus mendorong akan hal itu. Karena kualitas atau mutu pendidikan akan meningkat salah satunya jika ada sarana dan prasarana yang cukup,” pungkas Anang. ■

(ayu), Foto : Ayu/hr



Pemerintah Diminta Dorong Potensi Energi di Jalur Gunung Api

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, Pemerintah harus mampu memanfaatkan potensi energi yang ada guna mencapai kedaulatan energi, yaitu dengan mendorong geologi Indonesia yang berada pada jalur gunung api atau sering disebut 'Ring of Fire' Kondisi tersebut membuat Indonesia dianugerahi potensi sumber daya Panas Bumi yang sangat melimpah.

Menurut data Kementerian ESDM, lanjutnya, potensi sumber daya panas bumi Indonesia hampir 30 Giga Watt (Gw) dan terdistribusi di 330 titik potensi dengan keberadaan 127 gunung api di seluruh nusantara. Oleh karena itu, kita semua sebagai bangsa Indonesia harus mendorong pengembangan Panas Bumi untuk kemashlahatan bersama sehingga kedaulatan energi dapat terwujud.

Potensi Panas bumi di Indonesia, lanjutnya, harus dapat dikelola sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala sumber daya yang ada di dalam bumi Indonesia di kelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. "Berdasarkan hal tersebut maka DPR dan pemerintah merevisi UU tentang Panas Bumi No.27 tahun 2003 menjadi UU No. 21 Tahun 2014 yang telah mengatur pemanfaatan Panas Bumi untuk kepentingan bersama," ujar Agus dalam Pameran Geothermal, di JHCC yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan dihadiri Menteri ESDM Ignatius Johan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan para pakar serta para penggiat energi Panas Bumi di Indonesia, Rabu, (02/07).

Dia menambahkan, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah melahirkan beberapa gagasan penting guna mendorong pencapaian target pemerintah tahun 2025, antara lain menghilangkan istilah pertambangan dalam kegiatan Panas Bumi, kewenangan Menteri dalam izin Panas



Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto

Bumi dan mekanisme penugasan langsung kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendapatkan Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi.

Untuk mendukung pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, paparnya, pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang mengenalkan konsep Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) kepada Badan Usaha yang memiliki potensi atau ketertarikan melakukan pengembangan panas bumi. Selanjutnya, Lelang WK Panas Bumi tidak berdasarkan pada harga tetapi berdasarkan program kerja dan kemampuan keuangan untuk mendapatkan WK Panas bumi. ■

(si) Foto : Jaka/hr

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra

Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief

Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Mujiono

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,

Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Ketua DPR Ajak Masyarakat Untuk Perangi Narkoba



Konpres Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Kepala BNN



Ketua DPR RI Setya Novanto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan Narkoba dan menyatakan perang terhadap narkoba. Ia tidak mau keramahan penduduk dan indahnya wilayah Indonesia dirusak narkoba.

“Besarnya jumlah penduduk, luasnya wilayah Indonesia, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi kita menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengedar Narkoba dalam memasarkan produknya. Hal ini harus kita lawan bersama. Kita tidak sudi jika keramahan penduduk dan indahnya wilayah Indonesia dirusak Narkoba. Kita harus segera keluar dari kondisi Darurat Narkoba yang sangat mengkhawatirkan ini. Perang terhadap Narkoba harus terus dikobarkan,” paparnya dalam rilis kepada media, Rabu (02/8/2017).

Sebagaimana diketahui, beberapa hari terakhir ini Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengamankan 1,3 ton sabu, disusul 1,2 juta ekstasi.

“Jumlah yang sangat fantastis. Informasi yang saya dapatkan dari BNN, setidaknya ada 72 jaringan Narkoba internasional beroperasi di Indonesia. BNN juga mendapatkan data dari National Narcotics Control Commission of China, bahwa jumlah sabu dari China yang masuk ke Indonesia mencapai 250 ton,” jelas politisi Golkar ini.

Sementara hasil riset Universitas Indonesia, menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai 4 juta jiwa atau setara 2,2% dari total penduduk Indonesia yang berusia 10 hingga 59 tahun. Prediksi BNN, setiap tahun para pengguna narkoba di Indonesia menghabiskan Rp 72 triliun. Besarnya jumlah uang dalam perputaran Narkoba, seharusnya bisa dipakai belanja barang kebutuhan pokok yang dapat menggerakkan roda perekonomian maupun membeli berbagai keperluan pendidikan.

“Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi - JK, setidaknya ada 18 bandar Narkoba yang divonis hukum mati. Kita berharap, dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu, para gembong Narkoba lain tidak akan berani datang ke Indonesia. Jangan sampai negara yang kita cintai ini dikuasai kartel Narkoba sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin,” mantap legislator dapil NTT ini.

Jika dibutuhkan, tegasnya, DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran bisa meningkatkan anggaran dalam pemberantasan Narkoba. Terutama dalam peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam melacak, mengidentifikasi, serta mengungkap keberadaan para bandar Narkoba.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu padu bersama BNN dan aparat penegak hukum dalam memberantas Narkoba. Keluarga sebagai salah satu elemen penting dari masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga generasi bangsa.

“Karena itu, peran orang tua dalam keluarga sangat penting dalam mendidik anak-anak terhindar dari Narkoba. Mari kita jaga keluarga kita dari penyalahgunaan Narkoba,” pungkasnya. ■

(sc). Foto: Jakaahr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima Delegasi Parlemen Korea Selatan

DPR dan Parlemen Korea Selatan Bahas Isu Semenanjung Korea

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais dan Anggota Komisi I Evita Nursanty menerima kunjungan delegasi Parlemen Korea Selatan. Delegasi Parlemen Korea Selatan dipimpin Ketua Komite Pertahanan Won Yoo Chul dengan didampingi tiga orang anggota Parlemen Korea Selatan antara lain Yoo Ki Juni, Hong M OOD Jong dan Yoon Sang Huti.

Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Duta Besar Korea Selatan Cho Tae Young, Fadli Zon menanyakan situasi di Semenanjung Korea. “Bagaimana situasi di Semenanjung Korea,

bagaimana progresnya saat ini, apakah ada kemajuan atau kemunduran dengan Korea Utara,” tanyanya pada delegasi di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017)

Dijawab oleh Yoo Ki Juni bahwa ketegangan di Semenanjung Korea sedang memuncak. “Ketika kami berada di Sri Lanka sebelum berkunjung ke Indonesia, terjadi peluncuran yang dilakukan Korea Utara. Kami kira itu



bukan ICBM tapi rudal yang berkategori ICBM. Oleh karena itu bisa dikatakan ketegangan di Semenanjung Korea sedang memuncak dan banyak orang yang mengkhawatirkannya,” paparnya.

Menurutnya, peluncuran rudal yang diluncurkan Korea Utara ini bukan hal yang baru bagi Korea Selatan dan bagi masyarakat internasional. Peluncuran kali ini, lanjutnya, bisa menjangkau Benua Amerika. Karena jaraknya yang sangat panjang ini, banyak pihak yang sangat mengkhawatirkan.

Ia mengajak Indonesia untuk bersatu dengan masyarakat Internasional untuk menghentikan pengembangan nuklir oleh Korea Utara. “Kondisi saat ini belum waktunya untuk melakukan perlawanan secara militer,” tegasnya.

Anggota delegasi Parlemen Korea Selatan dari Partai Liberal ini mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan perhatian yang sangat besar untuk masalah Semenanjung Korea ini. Bahkan sambungnya, jarak tempuh rudal Korea Utara bisa menjangkau sampai Jakarta. Ia memohon dukungan dan kerjasama Indonesia dan masyarakat internasional untuk menghentikan provokasi yang tidak berarti oleh Korea Utara ini.

Sementara Hong M OOD Jong menyatakan, poros dunia akan berpindah ke Asia. Ia mengharapkan dan meminta dukungan penuh dan perhatian Indonesia terkait masalah ini. “Karena ini bukan masalah Semenanjung Korea saja tetapi masalah internasional,” tegasnya.

Atas jawaban tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa Indonesia bersama Korea Selatan tentunya menginginkan adanya perdamaian di wilayah dan semenanjung kawasan ini, terutama di Asia Tenggara dan Asia pada umumnya.

Politisi Gerindra ini berharap kerjasama yang sudah berjalan antara parlemen kedua Negara maupun kerjasama dengan masyarakat Indonesia dapat terus ditingkatkan. “Dan keinginan kerjasama Korea Selatan dengan ASEAN sangat tepat,” ungkapnya.

Pertemuan kedua delegasi parlemen ini ditutup dengan tukar menukar cinderamata. Dalam kesempatan ini, Fadli memberikan cinderamata Wayang Golek untuk delegasi Parlemen Korea Selatan. ■

(sc), Foto : Jayadi/hr.

APBN-P 2017 Disahkan Paripurna DPR



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima laporan dari Ketua Banggar Azis Syamsuddin

Setelah mendapat interupsi dari anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI, akhirnya RUU Perubahan atas UU No 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 (APBN-P 2017) disahkan.

“Apakah laporan Banggar DPR tentang RUU Perubahan atas UU No 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin rapat tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). “Setuju” jawab seluruh hadirin paripurna.

Sehari sebelumnya, Rabu (26/7/2017) Rapat Badan Anggaran dapat menyetujui APBN-P 2017 untuk kemudian dibawa ke tingkat Rapat Paripurna pada hari ini untuk disahkan.

Dalam APBN-P 2017, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 4,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

Terkait harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$ 48 per barel, lifting minyak bumi sebesar 815 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Hal lain mengenai penerimaan negara disepakati sebesar Rp 1.732,95 triliun dari sebelumnya Rp 1.750,3 triliun di APBN 2017. Lalu, terkait belanja negara dalam APBN-P diproyeksikan sebesar Rp 2.133,29 triliun dari sebelumnya Rp 2.080,5 triliun di APBN 2017.

Dalam laporan yang dibacakan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin mengucapkan terima kasih atas pandangan fraksi-fraksi dalam pembahasan APBN-P 2017 ini. “Pendapat mini fraksi, pendapat pemerintah dan draft akhir RUU APBN-P 2017 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini,” tegas Azis. ■

(ns/sc), Foto : Iwan/hr

Pansus Angket KPK Buka Kotak Pandora Penanganan Korupsi

Hasil temuan Pansus Angket KPK DPR RI sejatinya bertujuan untuk membuka kotak Pandora penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu pada diskusi di Pers Room yang dihadiri oleh Johnson Panjaitan (pengamat hukum) Adhie Massardi, Prof. Syaiful Bakhri (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta), Rabu, Jakarta, (2/8).

“Bagi kita dalam Panitia Angket ini semacam kotak Pandora, baru kita tahu Panitia Angket mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang diarahkan oleh penyidik KPK, dipanitia angket juga kita menemukan bahwa ada aset hasil korupsi yang disita oleh KPK yang katanya disetor ke negara tetapi tidak disetor ke negara,”ungkapnya.

Menurutnya, melalui Pansus Angket kita juga tahu bahwa ada proses pelanggaran HAM, dimana orang disekap

dan diarahkan untuk kepentingan KPK. “Dari 162 kasus proyek Nazaruddin terbukti hanya satu yang diputus oleh KPK yaitu wisma atlit. selain itu dari proyek nazaruddin sebesar Rp 7.7 triliun hanya lima yang ditangani KPK yang nilainya hanya sebesar Rp 200 Miliar,”paparnya.

Pada kesempatan itu, Masinton membandingkan dengan pihak Kepolisian yang menangani kasus yang bernilai lebih besar dibandingkan KPK. Seperti pihak Kepolisian menangani 19 kasus sebesar Rp 2.2 triliun, sementara Kejaksaan menangani 9 kasus Rp 700 miliar.

Masinton menilai, opini yang dibangun KPK diluar, bahwa kerja Pansus Angket KPK itu mengada-ada adalah tidak benar. Pansus memiliki obyek penyelidikan yang jelas dan sesuai dengan UU. “Pansus ini dituding macam-macam



Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu

dan dikaitkan dengan Perkara E-KTP faktanya kita bekerja dalam konteks penyelidikan dan melaksanakan UU. kita tidak ada menyinggung perkara ini opini yang dibangun KPK dan suporternya,” tandasnya. ■

(sil). Foto : Jayedil/hr.

DPR Desak PBB Susun Resolusi Selamatkan Al-Aqsa



Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menerima elemen aliansi pemuda islam

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengemukakan segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al-Aqsa, Palestina. Apalagi, masjid ini merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Ia meminta Pemerintah RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) aklamasi menyusun resolusi untuk menyelamatkan Al-Aqsa termasuk melindunginya.



“Kali ini dibutuhkan resolusi yang dapat dieksekusi, bukan resolusi yang lemah dan seperti sebelum-sebelumnya yang dapat begitu saja tidak dihormati Israel,” tegas Kharis, disela-sela menerima elemen Aliansi Pemuda Islam (API) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan itu, Kharis didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung.

Selain itu, politisi F-PKS itu meminta Pemerintah RI dapat mendesak OKI untuk menggelar sidang istimewa, untuk bersatu menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari aksi teroris Israel. Serta menghapus

sepenuhnya praktik penjagaan berlebihan di kompleks Al-Aqsa, seperti detektor logam, cctv dan penjagaan tentara Israel yang disertai perilaku represif.

“Adakalanya harus diplomasi. Namun memasuki musim dingin mendatang sekiranya kita juga harus teruskan mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” himbau Kharis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kharis menjelaskan praktek Israel sejak 14 Juli 2017 sebagai kebiadaban kesekian kalinya. Apalagi dengan Israel yang melarang sholat Jum’at di masjid Al-Aqsa untuk pertama kalinya sejak setengah abad tentara Yahudi menguasai masjid Al

Aqsa tahun 1967. Masjid Al -Aqsa sebagai masjid suci Umat Islam dan warisan budaya internasional berdasarkan resolusi UNESCO, seharusnya dilindungi dari teror radikal zionis Israel.

“Status sebagai warisan budaya internasional maka Al-Aqsa dan Al-Baldah Al Qodimah (kota lama) tidak layak ditetapkan sebagai kawasan militer. Apalagi tempat penganiayaan penjaga masjid, perampasan telpon, dan pengusiran jama’ah sholat dari Al-Aqsha. Kawasan ini berhak untuk selalu terbuka, tidak ditutup pintu-pintu masjidnya,” pesan politisi asal dapil Jateng itu. ■

(sf,mp), Foto: Sojyan/hr

KPK 15 Tahun Sudah Waktunya Dievaluasi dan Dikritisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini berusia 15 tahun (2002- 2017), maka sudah waktunya kinerja KPK dievaluasi dan dikritisi. KPK tidak boleh anti kritik, dan sebaliknya pengkritik malah di-bully dan dituding untuk melemahkan KPK dan sebagainya.

“Karena itu Pansus Angket KPK DPR RI ini sebagai kotak pandora untuk mengkritisi kinerja KPK tersebut.

Jadi, fase membela KPK sudah cukup, dan kini saatnya mengkritisi. Termasuk melalui pansus angket KPK,” kata Wakil Ketua Pansus angket KPK Masinton Pasaribu saat diskusi dialektika demokrasi dengan tema “Pansus KPK dan Pemberantasan Korupsi” di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (02/8/2017).

Dalam diskusi yang menghadirkan narasumber Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Masardi, Praktisi Hukum Johnson Panjaitan, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bachri, juga hadir Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, anggota pansus John Kennedy Aziz, Henry Yosodiningrat, dan lain-lain.

Pansus menilai kinerja KPK sudah mulai tidak sesuai dengan penegakan hukum itu sendiri. Misalnya menjadikan terpidana M. Nazaruddin (eks Bendum Demokrat) sebagai sumber berita, sehingga apa saja yang diinginkan KPK bisa diomongkan oleh Nazar.

Contohnya, dari 125 kasus Nazaruddin, yang bernilai Rp 7.7 triliun, hanya 5 kasus yang ditindaklanjuti



Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu saat diskusi dialektika demokrasi

senilai Rp 200 miliar. Asset yang disita pun tidak semua dikembalikan kepada negara. Tapi, polisi yang mampu mengamankan asset negara Rp 2,2 triliun dan Kejaksaan Rp 700 miliar, kata Masinton, pemberitaannya tidak seheboh seperti KPK.

Bahkan saksi yang dihadirkan di Tipikor sudah diatur oleh KPK. Anehnya, setelah mereka memberikan kesaksian,

keterangan yang diambil oleh KPK malah keterangannya Nazaruddin.

“Nazaruddin ada di ruang penyidik yang siap memberikan keterangan pada ha kim Tipikor. Namun, pansus dituding macam-macam; melemahkan KPK, tak proporsional, terkait kasus e-KTP, dan lain-lain. Padahal, itu cerita lama dan pansus komitmen untuk penguatan KPK,” pungkas Masinton. ■

(sc), Foto: Jayadi/hr

Jangan Sampai Ada Rakyat Indonesia Tidak Dapat Layanan Sosial

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Noor Achmad menegaskan jangan sampai ada seorangpun di Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan sosial. Pelayanan sosial kepada masyarakat merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan dengan kualitas yang terus meningkat.

“Karena itu Kunker Komisi VIII ke Palu, Sulawesi Tengah ini ingin mengetahui dan melihat perkembangan panti-panti sosial di seluruh Indonesia,” ungkap Noor Achmad saat mengunjungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Arrahman di Palu, Selasa (01/8/2017) sore.

Menurut politisi Golkar ini, Komisi VIII mengapresiasi Dinas Sosial setempat membina dan membantu Panti Sosial Arrahman beserta para pengasuhnya. LKSA yang berdiri sejak tahun 2009 lalu kini mengasuh 48 orang anak terdiri 20 laki-laki dan 28 perempuan.

Dari jumlah itu telah berhasil menamatkan 8 anak dan masuk kuliah serta bekerja. Yang menarik dari LKSA

ini telah menjalankan usaha ekonomi produktif berupa penyewaan alat pesta dan usaha pengemukaan

produktif ini mampu menghidupi panti sebab selama ini bantuan dari Dinsos hanya untuk 20 anak padahal jumlah yang diasuh 48 orang. Kepada para anggota dewan mereka berharap bisa memperjuangkan kenaikan anggaran sehingga bisa mencukupi untuk operasional LKSA Arrahman.



Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Noor Achmad saat mengunjungi LKSA Arrahman di Palu

“Ketua Yayasan silahkan hubungi Dinsos, kalau ditolak silahkan telpon Komisi VIII,” kata Noor Achmad sembari memberikan nomor HPnya. Perhatian dan kepedulian ditunjukkan Tim Komisi VIII secara patungan memberikan hadiah Rp 3 juta rupiah. ■

(mp), Foto: Masturfr

Miris Pelabuhan Benoa Bali Tidak Masuk RIP Nasional

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya merasa miris melihat pelabuhan Benoa, Bali yang tidak masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Nasional dan proses izin yang belum rampung, pasalnya belum ada nota kesepahaman antara Pelindo dengan pihak pemda terutama Pemkot Denpasar terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Ini merupakan kunjungan Komisi V DPR yang kedua kalinya, kami menitikberatkan pada Pelabuhan Benoa yang merupakan Pelabuhan terbesar di Bali,” kata Lasarus saat memimpin Tim Komisi V melakukan pertemuan dengan Direktur Pelindo III, Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV I Gusti Ngurah Rai, Kementerian Perhubungan dan Basarnas membahas tentang infrastruktur, alat transportasi massal dan Pelabuhan Benoa, di Bali, Senin, (31/7/2017).



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat meninjau Pelabuhan Benoa Bali



Pertumbuhan Ekonomi NTT Bagus Tapi Angka Kemiskinan Tinggi

Ketua Tim Kunjungan Kerja Melchias Markus Mekeng menyatakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bagus hampir menyamai pertumbuhan ekonomi tingkat nasional yaitu sebesar 5,18%.

Namun, ia menyayangkan dengan pertumbuhan ekonomi yang hampir menyamai pertumbuhan tingkat nasional itu, tetapi kemiskinan di Provinsi NTT masih tinggi sekitar 22%.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh para penguasa saja, tetapi rakyat kecil tidak merasakan,” ujar politisi Golkar ini usai pertemuan dengan Kanwil BPK, Kanwil OJK, Kanwil BPS, Perbankan Provinsi NTT, PT. Askrindo dan Jamkrindo, BI dan BNI di Kota Kupang, NTT, Selasa (01/8/2017).

Utamanya, lanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT harus didasarkan pada peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan. Sebab, produk domestik regional bruto (PDRB) NTT sebanyak 30 persen berasal dari dua sektor itu.



Suasana Rapat Komisi XI DPR dengan PemProv NTT

Melchias menyampaikan jika gini rasionya melebar antara si kaya dan si miskin, maka pada akhirnya APBN tidak akan tercapai. “Kita juga akan melihat apakah ada kebijakan-kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan

pusat, dan uang- uang APBN benar- benar sampai ke tangan masyarakat, jika sampai ke tangan masyarakat akan bisa memperbaiki taraf kehidupan masyarakat,” ungkapnya

Ia berharap agar anggaran yang ada itu diprioritaskan ke satu sektor, dan tidak difokuskan ke semua sektor, karena itu akan menjadi terpecah- terpecah jika difokuskan ke semua sektor dan tidak akan membawa dampak, “Jadi kita meminta agar lebih prioritas.” Tutupnya. ■

(azka/sc), Foto : Azka/hr



Seluruh program yang dibuat Pelindo, lanjutnya, banyak yang terhenti dan tidak bisa dilaksanakan sementara pelabuhan ini perlu perluasan. Contoh tempat sandar kapal barang, tempat sandar kapal penumpang dan sandar kapal pesiar dari luar negeri serta gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) semua memanfaatkan satu area sementara disini ada potensi perluasan yang sangat besar.

Dalam kesempatan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa Komisi V DPR yang menangani infrastruktur ingin melihat sejauh mana masalah tersebut. “Terkadang sewaktu mengadakan pertemuan di luar negeri kita selalu ditanyakan komitmennya dalam perluasan Benoa, karena ini terkait banyaknya turis yang keluar masuk dari Pelabuhan Benoa ini. ketika kita tanya Pelindo, mereka mengatakan bahwa dananya sudah ada, tetapi masih ada beberapa permasalahan di lapangan dan perizinan,” ungkap Lasarus.

Sementara itu dijelaskan Direktur Pelindo III Husein Latief, bahwa persoalannya ada di perbedaan gambar antara RIP yang diusulkan KSOP berbeda dengan lampiran gambar di Perda sehingga RIP belum dapat disetujui oleh Menteri tetapi sudah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Tingkat II. ■

(chas), Foto : Chasbi/hr



Tim Komisi X DPR di Provinsi Papua

Pembangunan di Papua Harus Perhatikan Aspek Kebudayaan Asli

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua Ferdiansyah (FPG) menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memperhatikan aspek kebudayaan asli Papua. Penegasan tersebut disampaikan usai pertemuan dan sekaligus kunjungan ke Dewan Kesenian Tanah Papua (DKTP) di Jayapura, Minggu (30/07/2017).

“Hal tersebut penting mengingat Indonesia memiliki keragaman kebudayaan yang luar biasa. Misalnya saja di Papua saat ini menurut penjelasan Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua masih ada 245 etnis yang merupakan bagian yang harus diperhatikan dan dilestarikan. Karena itu ketika kita melakukan pembangunan di Papua maupun pembangunan yang sifatnya nasional harus memperhatikan etnis-etnis yang ada di wilayah tersebut, “papar Ferdiansyah.

Lebih lanjut Ferdiansyah mengungkapkan, Komisi X DPR memandang penting agar pembangunan memperhatikan aspek kebudayaan. Karena itu Komisi X DPR mengunjungi

dan melakukan dialog dengan DKTP.

Ia menandakan bahwa arti penting pendidikan yang tidak hanya memperhatikan perkembangan otak kiri saja, melainkan juga harus memperhatikan perkembangan otak kanan melalui kebudayaan. “Karena itu menjadi penting dan mutlak untuk melakukan sinkronisasi pertumbuhan otak kanan dan kiri, sehingga dapat mewujudkan terciptanya masyarakat yang memiliki intelektualitas yang tidak meninggalkan jati diri bangsa,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DKTP Mambroku Nomensen menyampaikan harapan DKTP agar seluruh pengambil kebijakan di Papua paham bahwa DKTP tidak bisa dilepaskan dalam proses pengambilan kebijakan di

tanah Papua. “Karena DKTP itu identik dengan harkat dan martabat masyarakat Papua,” tegas Mambroku.

Berdirinya Dewan Kesenian (DK) itu sendiri pada awalnya berfungsi sebagai “penghubung” antara pemerintah dan para seniman di tengah fenomena cairnya sebuah migrasi budaya. Dalam perjalanannya DKTP mengalami berbagai macam persoalan, termasuk kebijakan politik yang dirasa sangat mengganggu. Namun, DKTP akhirnya mengalami interpretasi dan reinterpretasi peran dan fungsinya dengan keluarnya Instruksi Mendagri No. 5A Tahun 1993 tentang pendirian Dewan Kesenian. Sejak saat itu berdirilah DK di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten dengan surat keputusan kepala daerah setempat.

Terhadap Inpres No.5A Tahun 1993 tersebut, DKTP minta agar dapat dijadikan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) atau menjadi regulasi lainnya dibawah UU No. 5 Tahun 2017 tentang Kebudayaan. ■

(skr/asc), Foto : Singgih/hr



Banyak Kebijakan Pemerintah Tidak Tersosialisasi dengan Baik

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai, banyak kebijakan positif yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, kebijakan-kebijakan itu tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga berbagai kebijakan baik itu, tidak dipahami oleh masyarakat. Misalnya terkait pentingnya pembangunan infrastruktur sebuah wilayah.

“Itu di dunia manapun, mengapresiasi langkah membangun infrastruktur. Karena infrastruktur yang mendorong ekonomi,” kata Taufiq, dalam interupsi saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7).

Politisi F-Nasdem itu menilai, masyarakat yang berpikir jangka pendek melihat anggaran infrastruktur membutuhkan biaya tinggi dan menghabiskan anggaran.

“Karena itu, menurut saya harus dikomunikasikan bahwasannya pembangunan infrastruktur memang

sangat penting. Memang hasilnya tidak dirasakan dalam jangka waktu sampai kita melihat hasil akhirnya. Karena ini untuk jangka panjang,” imbuhnya.

Untuk itu, ia mendukung sepenuhnya upaya perencanaan yang dilakukan pemerintah. Jika ada yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kebijakan yang salah, maka orang yang berpikiran seperti itu yang salah,” tutup politisi asal dapil Jatim itu. ■



Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi

Surplus Beras Harus Dinikmati Semua Petani



Wakil Ketua Komisi IV DPR, Roem Kono

Kondisi surplus beras di daerah harus bisa dinikmati semua petani, baik yang memiliki lahan maupun yang tidak. Pemerintah harus seimbang memberi perhatian, agar semua petani sejahtera.

U ngkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Komisi IV Kunjungan Kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) Senin (31/7/2017).

Dijelaskan Roem Kono, saat ini Sulbar mengalami surplus beras sebesar 200 ton. “Kondisi surplus itu percuma hanya dinikmati oleh petani yang mempunyai lahan. Petani yang tak punya lahan tetap kurang menikmati kesejahteraan, karena pemerintah hanya memberikan bantuan bagi yang punya lahan,” katanya.

Ironis, bila di Sulbar alami surplus beras tapi masih ada kantong kemiskinan. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Bantuan pertanian tidak hanya bagi petani yang memiliki lahan, bagi tak memiliki lahan juga harus bisa menikmati bantuan pemerintah. Kondisi surplus ini baru dialami Sulbar setelah 13 tahun berdiri.

Kini, sambung Roem, kemajuan Sulbar sudah jauh lebih baik ketimbang 13 tahun lalu. “Sulbar sudah maju. Daerah ini punya potensi luar biasa dibandingkan era saya di Gorontalo. Kemajuan di sini luar biasa. Dan saya berpikir, sebetulnya negara kita ini makmur kalau dikelola dengan baik,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. ■

(rni), Foto : Runtih



Tim Komisi IV DPR kunjungi Gudang Bulog Sub Divre XI Jember

Pemerintah Diminta Perbaiki Manajemen Penataan Beras

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa pemerintah perlu memperbaiki manajemen penataan beras dalam perberasan nasional. Hal ini dikatakannya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV dengan Bulog di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur, Senin (31/7/2017).

“Harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras, perlu dilakukan penataan secara nasional,”

ujar Herman.

Selama ini, lanjutnya, Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

ketika harga gabah petani anjlok. Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar.

“Sejauh ini, HPP gabah atau beras dinilai belum rasional sehingga jangan disalahkan beras Bulog tidak berkualitas dan berasnya kurang baik karena HPP jauh dari harga pasar,” tandas anggota dewan dari Demokrat ini.

“Ada kekhawatiran ketika HPP dinaikkan akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa dirinya sempat mendengar kalau pemerintah sudah mulai membicarakan tentang penataan manajemen perberasan dan sudah dibentuk tim untuk mengkaji, serta membuat tata kelola yang tepat agar harga beras tetap tinggi dan petani bisa menikmati.

“Di sisi lain, harga beras di pasaran juga jangan terlalu memberatkan masyarakat, sehingga perlu ditata dengan baik,” harapnya.

Setelah melakukan pertemuan dengan Bulog, Tim Komisi IV memantau stok beras yang ada di gudang beras Jember dan melakukan dialog dengan para petani. Dalam tinjauan tersebut terdapat serapan gabah dan beras di Bulog Jember hingga bulan Juli 2017 sudah hampir mencapai 100 persen dari target Kementerian Pertanian, bahkan serapan tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia. ■

(eno), Foto: Kresna/hr

Sumbar Berpotensi Bangun Suaka Alam

Provinsi Sumatera Barat dinilai memiliki hutan yang terjaga dan lestari, hal ini berkat peran serta kesadaran masyarakatnya yang melindungi hutan. Di Sumbar berlaku adat dan tradisi masyarakat dalam melindungi kelestarian hutan, karena itulah tidak heran hutan di Sumbar tetap terjaga. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengapresiasi semua kelompok masyarakat yang turut serta menjaga kelestarian hutan tersebut.



Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo



Dia menyampaikan, bahwa Sumbar memiliki potensi besar membangun suaka alam, sebagai tempat perlindungan ekosistem hayati dan nabati. Atas dasar tersebut, ia menegaskan daerah ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam menjaga kelestarian hutan.

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV di Balai Pertemuan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, Padang, Sumbar. "Karena masyarakat berpegang teguh pada adat yang menjaga kelestarian alam. Ini yang saya pikir menjadi contoh baik bagi daerah-daerah lain," papar Edhy, Ahad (30/7/2017).

Dia juga mengatakan, meskipun di Sumbar banyak perkebunan kelapa sawit dan karet namun masih ada

keseimbangan, alam dan hutan tetap terjaga. "Dan ini yang harus kita tularkan ke provinsi lain, kita sampaikan, bahwa ternyata ada daerah yang mampu menjaga hutannya. Kalau Anda lihat di Sumatera Barat cukup banyak perkebunan kelapa sawit, karet banyak tapi hutannya masih terjaga dengan rapi," imbuh Edhy.

Dia juga mengatakan Komisi IV berkomitmen memberikan dukungan dalam menjaga kelestarian hutan di Sumbar, bahkan belum lama ini Edhy turut serta dengan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya melepas harimau. "Sumatera Barat punya potensi besar untuk membangun suaka alam yang lebih besar lagi, dan saya pikir pemerintah wajib untuk mendukung itu. Sumbar menjadi contoh untuk lingkungan," jelasnya.

Berdasarkan peraturan yang ada

masyarakat Nagari Sungai Buluh dapat memanfaatkan keberadaan hutan lindung yang ada, untuk dikelola selama jangka waktu diberikannya hak pengelolaan Hutan Nagari yaitu selama 35 tahun. Masyarakat sekitar juga dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, ekowisata dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu masyarakat juga diperbolehkan melakukan budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah dan budidaya hijauan makanan ternak serta penangkaran satwa liar. Bersama dengan pemerintah daerah masyarakat menentukan mitra untuk melakukan kegiatan pendampingan yang berasal dari pemerintah, Lembaga Swadaya, Perguruan Tinggi atau pihak lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat. ■

Foto : Eiko/hr

Perppu No 1 Tahun 2017 Ditetapkan Menjadi UU

Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi UU. Perppu ini ingin menghimpun penerimaan pajak secara maksimal untuk pembangunan nasional.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin rapat, Kamis (27/7), mengetuk palu atas penetapan Perppu ini. Seperti diketahui, Perppu tersebut merupakan kelanjutan dari implementasi perjanjian internasional dibidang pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan atau yang dikenal juga dengan Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI). Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng dalam laporannya di hadapan rapat paripurna mengatakan, disetujuinya Perppu ini akan memberi kepastian hukum yang jelas.

"Kita mengharapkan dengan disetujuinya RUU tentang Perppu No.1/2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan

perpajakan dan memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional terkait dengan pertukaran informasi keuangan secara otomatis," paparnya.

Perppu ini, lanjut Mekeng, juga memberi keleluasaan bagi Dirjen Pajak untuk mengakses informasi keuangan yang selama ini masih terbatas. Basis data pajak bisa diperkuat bila akses dari lembaga keuangan dan negara mitra AEOI dibuka seluas-luasnya. Dengan begitu, ada upaya untuk peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio.

Sebelumnya, Perppu ini sudah dibahas Komisi XI DPR dengan pemerintah, para pakar dan akademisi, Kadin, Apindo, Perbanas, Bursa Efek Indonesia, Dewan Ausransi Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, dan lain-lain. Mekeng juga menyampaikan pandangan semua fraksi di DPR terhadap Perppu tersebut.

Sementara itu Menteri Keuangan dalam sambutannya atas nama pemerintah, menyampaikan, dengan ditetapkannya Perppu ini menjadi UU, maka ruang gerak



Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng

penghindar pajak dapat diperangi dan diminimalkan. "Dengan berpartisipasi dalam AEOI, Indonesia akan menerima secara otomatis informasi keuangan milik Wajib Pajak Indonesia yang disimpan di negara-negara mitra AEOI, yang selama ini sulit untuk dideteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak," ujarnya. ■

Foto : Andri/hr

Bimbingan Manasik Haji Sumsel Jadi Contoh Daerah Lain

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi kegiatan manasik haji yang dilaksanakan Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, bimbingan yang diberikan sangat baik dan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain bahkan tingkat nasional.

“Manasik haji tidak sekedar membaca doa, tetapi bagaimana implementasi pelaksanaan haji. Karena itu, kami harapkan ilmu dan keberhasilan provinsi Sumsel bisa menjadi contoh di tingkat nasional,” kata Maman dalam pertemuan Komisi VIII dengan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di

Palembang, Senin (31/07/2017).

Politisi dari F-PKB ini menegaskan, ibadah haji sebagai rukun islam kelima harus memenuhi persyaratan istitha'ah baik secara fisik maupun materi. Lebih jauh, menurutnya, bimbingan dalam manasik haji seharusnya bukan hanya sekedar bagaimana membaca doa yang

baik dan benar, tetapi lebih menekankan implementasi pelaksanaan haji.

“Termasuk hal-hal sederhana, seperti masuk kamar hotel. Sebab, kami menemukan banyak jamaah haji yang belum pernah masuk hotel yang terkadang menimbulkan insiden kecil. Untuk itu diperlukan bimbingan lebih lanjut, supaya selama menjalankan ibadah haji para calon jemaah haji bisa tenang dan nyaman,” sambungnya.

Hal senada diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, ibadah haji sebagian besar adalah fisik sehingga para Calon Jamaah Haji (CJH) membutuhkan pembekalan tidak hanya materi, tetapi juga secara teknis.

Menurut Alex Noerdin, pembekalan teknis yang diberikan kepada CJH mulai dari keberangkatan, pelaksanaan ibadah hingga kepulangan. Mengingat, sebagian besar CJH berasal dari daerah dan belum pernah naik pesawat. “Bayangkan kalau pesawat berangkat jam 6 pagi, ada 400 jemaah berebut 8 toilet, disitulah kadang terjadi huru-hara,” ungkapnya.

Sehingga dalam bimbingan manasik haji, lanjutnya, Calon Jamaah Haji diajarkan bagaimana memasang seat belt, masker, pelampung, dan yang terpenting belajar menggunakan toilet di pesawat.

Selain itu, pemerintah provinsi menyediakan fasilitas manasik, yakni Kabah dan lintasan Sa'i safa – marwah sepanjang 450 meter. Keduanya dibangun dengan ukuran yang hampir sama dengan yang ada di Tanah Suci. Bahkan, saat ini, pemerintah setempat sedang membangun sebuah hotel syariah, dilengkapi restoran timur tengah dengan konsep layaknya seperti hotel yang ada di Mekkah. Transaksi pun akan menggunakan mata uang real.

“Tujuannya, supaya masyarakat kita yang mau ibadah haji nanti sudah tahu, makanan apa yang kira-kira akan cocok, harganya kisaran berapa, dan paling tidak bisa bahasa arab dikit-dikit,” pungkasnya. ■

(ann), Foto : Anne/hr



Tim Komisi VIII DPR bersama Gubernur Sumsel



Tim Komisi IX DPR meninjau fasilitas kesehatan di Entikong

DPR Awasi DAK Kesehatan di Entikong

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Rp22 miliar untuk 20 puskesmas di Kecamatan Entikong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Anggaran itu diberikan untuk peningkatan layanan kesehatan di kawasan pedalaman perbatasan RI-Malaysia tersebut.

“Kunjungan Kerja kali ini, kami gunakan untuk melakukan pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik afirmasi kesehatan, untuk memastikan penggunaan DAK tepat sasaran untuk membangun serta menguatkan infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan di wilayah tertinggal, kepulauan dan perbatasan,” kata Ketua Tim Kunjuran Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi usai meninjau salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Entikong, Kalimantan Barat, Senin (31/7/2017).

Pasalnya, fasilitas kesehatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan dan kepulauan belum begitu memadai. “Makanya ketika kita berikan anggaran besar, kita harap terus dilakukan perbaikan. Yang pasti dananya harus sampai dulu.

Jangan sampai mentok ditengah jalan,” tuturnya.

Dede menjelaskan, konsep penggunaan DAK fisik afirmasi kesehatan harus jelas. Diantaranya, untuk alat kesehatan, infrastruktur sentra pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan tenaga medis, dan obat-obatan.

“Di Entikong ini distribusi obatnya masih bermasalah, kita akan bahas temuan ini saat rapat dengan Kemenkes nanti, untuk segera dicarikan solusi,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati yang berharap DAK fisik afirmasi kesehatan dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas kesehatan di Entikong yang sudah tidak memadai.

“Fasilitas di sini banyak yang harus diperbaiki, tadi saya sempat melihat ambulancenya yang tidak baik, kalau

pasien dibawa pakai ambulance seperti itu, yang ada pasien akan tambah sakit,” ungkapnya.

Maka dari itu politisi fraksi PPP itu meminta kepada Pemprov untuk memperhatikan fasilitas kesehatan yang harus direvitalisasi. Agar masyarakat yang berobat menjadi sehat bukan tambah sakit.

“Yang terpenting di negeri ini adalah masyarakat sehat, percuma sumber daya alam yang melimpah kalau tidak bisa dimanfaatkan karena masyarakatnya tidak sehat,” tutur Okky.

Selain infrastruktur kesehatan di perbatasan yang menjadi sorotan Komisi IX DPR adalah jaminan kesehatan masyarakat yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan.

Saat ini, dijelaskannya, pemerintah mengusulkan tambahan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran sebanyak 2 juta jiwa. Angka itu perlu divalidasi dengan teliti agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. ■

(mm/sc), Foto : Ria/hr

Aceh Potensi Pariwisata Luar Biasa

Aceh memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Sektor yang saat ini juga menjadi perhatian serius dari pemerintah itu pun sangat menjanjikan dan luar biasa jika dikelola dengan baik. Apalagi, sebagai daerah yang menerapkan Syari'at Islam, Aceh sangat cocok untuk mengembangkan pariwisata religi, pariwisata sejarah, wisata alam, kuliner dan pengembangan ekonomi kreatif lainnya.



Tim Komisi X DPR meninjau museum tsunami Aceh

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Aceh, Teuku Riefky Harsya, saat pertemuan dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Forkopimda Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah, Rektor Unimal, Ketua Harian KONI Aceh serta sejumlah Kepala SKPA terkait di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (31/7/2017).

"Sektor pariwisata mempunyai peluang yang luar biasa untuk

menyelamatkan Aceh pasca berakhirnya dana otonomi khusus yang akan berakhir 12 tahun mendatang. Dan berdasarkan hasil penelitian, sektor ini juga membuka lapangan kerja dan investasi yang termasuk dalam kategori paling murah," sambung Riefky.

Politisi F-PD itu yakin, dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, maka sektor pariwisata akan menambah mampu meningkatkan pendapatan daerah dan berimbas pada menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh.

"Kami melihat ada niat dan visi yang

sama dari Gubernur dan Wagub terpilih untuk fokus pada sektor pariwisata. Kami yakin, hal yang bersama kita perjuangkan ini akan bermanfaat, baik untuk kita maupun generasi penerus di Aceh," harap politisi asal dapil Aceh I itu.

Sementara itu usai pertemuan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, pihaknya akan mulai meningkatkan pengembangan pariwisata. Ia mengakui, saat ini dalam pengembangan sektor ini, masih banyak ditemui kekurangan.

Terkait persiapan Sail Sabang 2017, Irwandi menjelaskan masih ada kekurangan-kekurangan yang harus segera dilengkapi. Kekurangan itu terkait sarana prasarana, diantaranya transportasi dan akomodasi. Untuk transportasi, masih ditemui permasalahan penyebrangan melalui jalur laut antara Aceh dengan Sabang.

"Kami berharap kepada Komisi X DPR RI, yang kurang-kurang itu harus segera ditutupi. Kami juga berusaha menutupi (melengkapi, red) itu," imbuh Irwandi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Irwandi meminta Komisi X DPR dapat memberikan solusi terhadap 43 mahasiswa asal Aceh yang terlantar di Turki, yang merupakan mantan penerima beasiswa dari lembaga Fethullah Gulen. Pasalnya, pasca peristiwa kudeta seluruh lembaga terkait Fethullah Gulen, dibekukan operasionalnya oleh Pemerintah Turki atas perintah Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Pemerintah Aceh sudah sangat banyak memberikan beasiswa. Tahun ini saja, sebanyak 130 ribu anak yatim yang mendapatkan beasiswa dari jenjang SD hingga SMA yang mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp 2,4 juta. Jika dilihat nominalnya memang tidak banyak, tapi jika dikalikan 130 ribu orang, maka jumlahnya juga sangat besar," ungkap Irwandi.

Irwandi melanjutkan, Pemerintah Aceh juga memberikan bantuan biaya pendidikan untuk sarjana mulai dari S1, S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan jumlah yang cukup banyak. "Nah untuk yang 43 mahasiswa ini, kami minta Komisi X DPR dapat mencarikan solusinya," pinta Irwandi. ■



Pemda Diminta Sinergis Bangun Yogyakarta



Wakil Ketua Komisi XI, DPR Saepriyatno

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno meminta pemerintah daerah dan semua pihak bersatu padu serta bersinergi untuk membangun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan, setelah melakukan peninjauan secara langsung di lapangan, Soepriyatno menyatakan bahwa banyak hal-hal yang sudah bisa berjalan dengan baik di Yogyakarta.

“Kami minta agar semua pihak bersatu padu dan bersinergi untuk membangun Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka memberikan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jangan bergerak sendiri-sendiri, sebab kalau semua bersinergi maka akan lebih baik,” tandasnya di Yogyakarta Senin (31/7/2017).

Ia juga memaparkan bahwa sebagai provinsi yang menjadi sektor pariwisata, Yoga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan terus berjalan dengan baik dan ekonomi masyarakatnya juga akan terbantu.

Namun demikian masih banyak juga daerah-daerah yang kondisinya minus di Yogyakarta, khususnya daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul, lanjutnya. “Ini yang masih perlu mendapat support dari pemerintah pusat, supaya terjadi keseimbangan pembangunan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Yogyakarta,” ujar politisi F-Gerindra itu. ■

(dep) Foto: Ryan Dep/Jk

Direktorat Jenderal Pajak Perlu Lakukan Pendekatan Humanis

Pendekatan humanis jadi kebutuhan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di semua daerah untuk menjangkau wajib pajak baru maupun mengejar target penerimaan pajak. Para pengusaha wajib pajak harus dijadikan teman, bukan musuh yang terus diburu.

Cara pendekatan yang humanis ini diserukan anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit saat mengikuti pertemuan Tim Komisi XI dengan para mitra Komisi XI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (31/7/2017).

“Pemerintah dalam hal ini DJP harus menjadikan para pengusaha teman bukan musuh. Biarkan mereka tumbuh dulu baru kemudian pajaknya dipetik. Bukan baru tumbuh usahanya sudah dikejar pajaknya,” kata Supit.

Apa yang disampaikan politisi Partai Golkar ini terkait dengan target penerimaan pajak yang selalu meleset. Saat ini, ungkap Supit, banyak pengusaha tak mau lagi menyimpan uangnya di bank, karena perilaku petugas DJP yang tidak bersahabat. “Ekonomi nasional harus terus berjalan. Dan sektor swasta ikut punya andil besar dalam menumbuhkan perekonomian lewat pajak,” tegasnya.

Politisi dari dapil Kalsel ini mencontohkan, petugas DJP bisa mengajak makan bareng atau melakukan pendekatan yang lebih komunikatif. Ini lebih efisien daripada melakukan pendekatan represif yang pada akhirnya membuat para pengusaha lari dan tak bersimpati lagi pada DJP. ■

(mh/sc), Foto: Husein/hr



Anggota Tim Komisi XI DPR Ahmad Noor Supit menyerahkan cenderamata



Tim MK DPR di Polda Gorontalo

MK DPR Kunjungi Polda Gorontalo Sosialisasikan UU MD3

Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) mengunjungi Polda Gorontalo dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya menjaga martabat kehormatan citra kredibilitas institusi DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Demikian ungkapan Ketua Tim Kunjungan Kerja Sarifuddin Sudding disela pertemuan dengan Kapolda Gorontalo Rachmad Fuadil beserta pejabat kepolisian setempat, Selasa (25/7/2016).

Menurut politisi Hanura tersebut, dibentuknya MKD bertujuan untuk mendisiplinkan anggota dewan, ketika anggota dewan telah melakukan tindakan yang melanggar hukum maka fungsi MKD menindak dan mendisiplinkan anggota

dewan sehingga instusi DPR mendapatkan kepercayaan publik.

Hal serupa juga diungkapkan Politisi Golkar Agung Widyanto, MKD dibentuk yang paling utama adalah menjaga marwah DPR, sehingga apabila ada anggota DPR RI yang melakukan tindakan yang melanggar hukum warga yang merasa dirugikan dapat melaporkan ke kepolisian. Meski demikian, MKD sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga selama proses hukum belum terbukti pihaknya akan menghormati anggota tersebut.

Kapolda Gorontalo Rachmad Fuadil juga menegaskan pertemuan dengan MKD dapat memberikan pemahaman ke seluruh anggota kepolisian akan tugas, fungsi dan wewenang MKD serta dapat menjalin kerjasama antar lembaga dalam penegakan hukum.

Di sisi lain Politisi Golkar Ahmad Zacky Siradj menuturkan pertemuan tersebut untuk menjalin hubungan baik dengan Polda untuk meningkatkan etika-etika baik anggota DPR di daerah pemilihannya. "Masyarakat saat ini menghadapi permasalahan social distrust atau masyarakat yang kehilangan kepercayaan, oleh karena itu landasan etika sangat penting ditumbuhkan di masyarakat untuk meningkatkan tingkat kepercayaan," tutur Zacky.

Kunjungan Kerja Spesifik MKD ke Kapolda Gorontalo diikuti anggota Ahmad Zacky Siradj, Agung Widyanto, Muhammad Syafii, Darizal Basir, Muslim Ayub, TB. Soenmandjaja, Maman Imanulhaq, dan Fadholi. ■

(ryan,mp), Foto : Ryan/hr

Arogansi KPK Harus Dihentikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap menggunakan cara-cara arogansi ketimbang kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu evaluasi yang kini sedang dibahas di Pansus Angket KPK. Arogansi KPK ini terlihat hampir sama dengan pola yang digunakan CIA (Central Intelligence Agency) dalam mengusut kasus.



Adhie M Massardi bersama John Kennedy Azis



Koordinator Indonesia Bersih (KIB) Adhie M Massardi yang bertindak sebagai pembicara dalam Dialektika Demokrasi Rabu, (02/8/2017) mengatakan bahwa saat ini KPK menggunakan metode Enhanced Interrogation Techniques (EITs) layaknya CIA. Hal itu berdasarkan pengamatannya dari pengakuan saksi Niko Panji Titayasa dalam rapat Pansus Angket KPK beberapa hari lalu.

“Kalau dicermati secara seksama yang dialami Niko selama lebih dari satu tahun, menjelaskan kepada kita bahwa (para) penyidik lembaga anti-rasuah itu telah menggunakan metoda EITs (Enhanced Interrogation Techniques) yang pernah dipakai agen-agen CIA (Central Intelligence Agency) untuk mengorek keterangan orang-orang yang dituduh teroris di penjara Teluk Guantanamo, Kuba dan Abu Ghraib, Irak,” kata Adhie dalam paparannya.

EITs adalah teknik interogasi yang memaksakan seseorang untuk mengatakan apa saja yang diinginkan dari mereka. Hal ini harus segera diungkap apakah metode EITs yang dipakai KPK ini merupakan inisiatif oknum atau perintah dari institusi KPK. Ini menjadi tugas bagi Pansus KPK dalam menyelidikinya.

“Kalau inisiatif oknum, pelakunya harus diproses secara hukum. Tapi kalau sudah mendapat otorisasi institusi (KPK), maka Presiden harus melarang praktek keji itu dilakukan KPK. Karena hal itu melanggar HAM dan sangat tidak cocok diterapkan di negara Pancasila,” tegas Adhie.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu mengatakan tidak ada lembaga dimanapun yang tidak bisa diawasi, termasuk KPK. Sebagai lembaga negara, tentu harus mengutamakan prinsip transparansi dan kontrol. “Tidak ada lembaga di republik ini yang tidak diawasi dan anti kritik pula. Semua lembaga mengedepankan transparansi dan saling kontrol,” tegas Masinton.

Oleh karenanya, kesan negatif tentang Pansus KPK yang dianggap melemahkan KPK harus segera dihentikan. “KPK dan para pendukungnya membangun opini negatif terhadap Pansus Angket KPK. Ini sangat luar biasa,” pungkas Masinton. ■

(ns), Foto : Jayadifhr

Pengalihan Pengelolaan BLK Kupang Ke Pusat Harus Dipercepat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Pius Lustrilanang mempertanyakan lambatnya proses pengalihan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kupang ke pemerintah pusat. Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunker Komisi IX DPR yang dipimpinnya mengunjungi BLK Kupang, di NTT, Senin (31/7/2017).



Wakil Ketua Komisi IX DPR Pius Lustrilanang

Pius menambahkan bahwa kebijakan pengalihan pengelolaan BLK Provinsi Kupang sudah dilakukan sejak tahun 2015 namun hingga pertengahan 2017 tak kunjung selesai.

Politisi Gerindra ini menilai pengalihan tersebut penting untuk lebih mengefektifkan kerja-kerja di BLK, karena keterbatasan dana yang dimiliki APBD NTT (pemda), sehingga jika dikelola oleh pusat maka bisa dialokasikan dari APBN. Seperti kita lihat BLK ini sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja, baik yang bekerja di NTT maupun yang menjadi TKI ke luar negeri,” imbuhnya.

Senator Dapil NTT I ini juga menjelaskan bahwa dari penjelasan pihak pengelola BLK Kupang, Gubernur NTT sudah mengirimkan surat pada Kementerian Dalam Negeri agar pengambil Alihan BLK ini bisa segera diselesaikan.

“Sekarang sudah mulai proses peralihan tersebut dengan persetujuan DPRD juga Kemendagri dan insya Allah ke depan sudah bisa masuk di anggaran tahun 2018. Kami dari Komisi IX sepakat mendorong pengambilalihan BLK ini segera diselesaikan,” ungkap Pius.

Senada dengan Pius, Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri meminta Kemenaker untuk serius melihat persoalan peralihan BLK ini.

“Di NTT ada 2 BLK yaitu di Kota Kupang dan Ende. Nah kita ketahui di sini banyak tenaga kerja potensial yang ingin bekerja di luar negeri, tidak terbatas hanya sektor rumah tangga tapi juga sektor industri, perkapalan, menjadi chef (juru masak) di kapal pesiar dan sebagainya,” tambah Abidin.

Politisi PDIP ini juga menyarankan terkait masih rendahnya serapan lulusan BLK Kupang ke dunia kerja diperlukan sinergi antara pengelola BLK dengan pemda maupun pemerintah pusat yang menjembatani dengan dunia usaha.

“Pemerintah berkewajiban untuk menyalurkan para lulusan yang sudah dididik di BLK melalui jalur kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Sehingga bisa terserap di berbagai bidang usaha, seperti perhotelan, industri otomotif, garmen dan sebagainya,” tutup Abidin. ■

(Naelurroji), Foto : Ojje/hr

DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2016

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 untuk menjadi Undang-Undang (UU). Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto selaku Pimpinan Rapat pun menanyakan persetujuan itu kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir.

“Apakah RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016 dapat disetujui menjadi UU?” tanya Agus, yang disambut jawaban “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Kendati DPR menyetujuinya, sejumlah kesepakatan harus dijalankan oleh pemerintah.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmad Rizki Sadig dalam laporannya pun menjabarkan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah itu. Pertama, pemerintah diminta agar meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL), yang masih mendapat opini audit ‘Wajar Dengan Pengecualian’ atau opini ‘Tidak Menyatakan Pendapat’.

“Pemerintah juga agar meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian atau Lembaga,” jelas politisi F-PAN itu.

Selain itu, pemerintah juga diminta agar meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis aktual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada K/L dan pemerintah daerah. Pemerintah agar menyebarluaskan informasi LKPP kepada K/L yang mengelola anggarannya secara



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmad Rizki Sadig

efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit WTP atas laporan keuangannya.

“Pemerintah agar meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Serta melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation angkutan orang dengan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Rizki.

Rizki melanjutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2016 kepada DPR RI, DPD RI dan Presiden RI pada 18 Mei lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPP 2016.

“Opini WTP atas LKPP tahun 2016 tersebut merupakan opini audit terbaik dan yang pertama kali dicapai oleh pemerintah selama 12 tahun semenjak LKPP disusun

dan diaudit oleh BPK,” apresiasi politisi asal Jember itu.

Namun berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2016 itu, terdapat 16 temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yang terdiri dari 12 temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan empat temuan pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Rizki juga menyampaikan ringkasan pada LKPP 2016, diantaranya Realisasi Pendapatan Negara dalam TA 2016 sebesar Rp 1.555,9 triliun, yang berarti hanya tercapai hanya 87,1 persen dari APBN-P 2016. Sementara, realisasi belanja negara berjumlah Rp 1.864,3 triliun, yang berarti mencapai 89,5 persen dari APBN-P 2016.

“Berdasarkan realisasi pendapatan negara dibandingkan dengan belanja negara, maka defisit anggaran berjumlah Rp 308,3 triliun, yang berarti mencapai 103,9 persen dari APBN-P TA 2016. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp 334,5 triliun, yang berarti 112,7 persen dari APBN-P TA 2016,” papar Anggota Komisi IX DPR itu.

Selain itu, ringkasan lainnya yakni Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir TA 2016 sebesar Rp 113,2 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2016 sebesar Rp 26,2 triliun. Per 31 Desember 2016, jumlah aset sebesar Rp 5.456,9 triliun, jumlah kewajiban sebesar Rp 3.889,9 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp 1.556,9 triliun.

Sementara, operasional TA 2016 sebesar Rp 1.664,7 triliun, dengan beban operasional sebesar Rp 1.872,3 triliun. Maka terdapat defisit dari kegiatan operasional TA 2016 sebesar Rp 207,6 triliun. Dengan surplus dari kegiatan operasional TA 2016 sebesar Rp 67,9 triliun.

Menanggapi persetujuan itu, Pemerintah yang diwakili Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dengan menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi DPR. ■

(s.f.m.p). Foto: Andri/hr



Tim Komisi IX DPR berdialog dengan Pasien di Rumah Sakit Wamena, Jayawijaya

Komisi IX Akan Kawal Pembangunan RS Vertikal

Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX ke Wamena, Jayapura Syamsul Bachri menegaskan akan mengawal proses pembangunan RS Vertikal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin penyediaan kesehatan bagi masyarakat Wamena yang kini masih memiliki keterbatasan jumlah rumah sakit sehingga tidak mampu menampung jumlah pasien yang ada.

“Kami dari Komisi IX DPR berjanji akan mengawal proses pembangunan RS Vertikal di Jayapura dalam RAPBN 2018. Kita mendorong pemerintah untuk mengutamakan pembangunan ini dalam rencana kerja prioritas pemerintah,” ujar Syamsul usai meninjau lokasi pembangunan RS Wamena di Jayawijaya, Senin, (01/8/2017).

Melalui pembangunan rumah sakit ini, masyarakat Wamena tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Jayapura untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga dari segi biaya transportasi akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. “Kita ingin masyarakat Wamena mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak,” sambung Syamsul.

Pembangunan RS Vertikal ini nantinya akan menggunakan dana APBN yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan sehingga tidak akan membebani APBD Provinsi Papua. Dukungan pemerintah pusat ini sangat penting dalam pembangunan di Papua, termasuk di bidang kesehatan. “Pembangunan RS Vertikal ini 100 persen menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan, jadi mulai infrastruktur dan SDM itu dibiayai Kemenkes,” tutur Syamsul.

Namun, besaran anggaran yang akan dikeluarkan dalam pembangunan ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah pusat. “Pembangunan ini adalah multi years, tidak dibebankan pada satu tahun anggaran 2018. Yang pasti 2018 akan

dimulai langkah konkrit,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Kemenkes Untung Suseno yang turut hadir mendampingi Kunker Komisi IX mengatakan akan berupaya penuh agar pembangunan RS Vertikal ini dapat sesuai yang telah direncanakan. “Kita juga minta dukungan DPR dalam pembangunan ini,” ujar Untung.

Selain dihadiri Syamsul Bachri (F-PG) sebagai ketua tim, turut hadir Wakil Ketua Komisi IX Saleh P Daulay (F-PAN) serta sejumlah anggota seperti Ketut Sustiawan (F-PDIP), Marinus Gea (F-PDIP), Sri Wulan (F-Gerindra), Robert Rouw (F-Gerindra), Muhammad Iqbal (F-PPP), Haeruddin (F-PAN), Handayani (F-PKB), Ali Mahir (F-Nasdem) dan Ansory Siregar (F-PKS). ■

(hs/sc), Foto: Hendrahr



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menghadiri Pameran Geothermal di JHCC, Jakarta, Rabu (2/8/2017). Foto: Jaka/hr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron memimpin Tim Kunker mengunjungi Tempat Pengolahan Pisang Mas Kirana, Lumajang (31/7/2017). Foto: Eno/hr



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Pius Lustrilanang meninjau sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Kupang NTT, Senin (31/7/2017) Foto: Naefuroji/hr